



PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
16. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 13.792.431.000,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 715.196.569.000,- |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. 10.380.000.000,- |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 739.369.000.000,- |

2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	213.179.518.066,-	
2) Belanja Bunga	Rp.	-,-	
3) Belanja Subsidi	Rp.	88.343.624.000,-	
4) Belanja Hibah	Rp.	32.345.327.500,-	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	31.648.000.000,-	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-,-	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	34.558.420.000,-	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>2.000.000.000,-</u>	
			Rp. 402.074.889.566,-
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	60.861.370.700,-	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	265.376.700.875,-	
3) Belanja Modal	Rp.	<u>271.056.038.859,-</u>	
			Rp. 597.294.110.434,-
Jumlah Belanja			<u>Rp. 999.369.000.000,-</u>
Surplus / (Defisit)			Rp. 260.000.000.000,-
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	260.000.000.000,-	
b. Pengeluaran	Rp.	-,-	
Jumlah Pembiayaan Neto			<u>Rp. 260.000.000.000,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan			Rp. -,-

P a s a l 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

P a s a l 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

P a s a l 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna.

P a s a l 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

P a s a l 6

Peraturan Bupati Natuna ini berlaku surut berlaku sejak tanggal 5 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Januari 2009


BUPATI NATUNA,



Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Januari 2009

SEKRITARIS DAERAH,



Drs. H. ILYAS SABLII, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR 1

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN APBD
Tahun Anggaran 2009

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	13,792,431,000.00
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	3,607,000,000.00
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	20,000,000.00
4. 1. 1. 01. 06.	Pajak Hotel Bintang Satu	20,000,000.00
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	25,000,000.00
4. 1. 1. 02. 01.	Pajak Restoran	25,000,000.00
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	2,000,000.00
4. 1. 1. 03. 19.	Pajak Hiburan Pertandingan Olahraga	2,000,000.00
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	100,000,000.00
4. 1. 1. 04. 01.	Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	100,000,000.00
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan Umum	3,400,000,000.00
4. 1. 1. 05. 01.	PPJU PLN	400,000,000.00
4. 1. 1. 05. 02.	PPJU Non PLN	3,000,000,000.00
4. 1. 1. 06.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	60,000,000.00
4. 1. 1. 06. 06.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	60,000,000.00
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	240,500,000.00
4. 1. 2. 01.	Retribusi Jasa Umum	36,000,000.00
4. 1. 2. 01. 01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	36,000,000.00
4. 1. 2. 02.	Retribusi Jasa Usaha	126,000,000.00
4. 1. 2. 02. 11.	Retribusi Penyeberangan di Air	26,000,000.00
4. 1. 2. 02. 14.	Retribusi Izin Tempat Usaha	100,000,000.00
4. 1. 2. 03.	Retribusi Perizinan Tertentu	78,500,000.00
4. 1. 2. 03. 01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	36,000,000.00
4. 1. 2. 03. 05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	22,000,000.00
4. 1. 2. 03. 06.	Retribusi Penggantian Biaya SIUP dan TDP	7,000,000.00
4. 1. 2. 03. 07.	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	2,000,000.00
4. 1. 2. 03. 08.	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	10,000,000.00
4. 1. 2. 03. 09.	Retribusi Izin Usaha Kesehatan	1,500,000.00
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,600,000,000.00
4. 1. 3. 01.	Pendapatan Laba Atas Penyertaan Modal Perusahaan Milik Daerah / BUMD	3,600,000,000.00
4. 1. 3. 01. 03.	Dividen Bagian Laba Bank Riau	3,600,000,000.00
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,344,931,000.00
4. 1. 4. 02.	Penerimaan Jasa Giro	3,975,931,000.00
4. 1. 4. 02. 01.	Jasa Giro Kas Daerah	3,975,931,000.00
4. 1. 4. 03.	Pendapatan Bunga	2,369,000,000.00
4. 1. 4. 03. 01.	Pendapatan Bunga Deposito Bank	2,369,000,000.00
4. 2.	Dana Perimbangan	715,196,569,000.00
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	585,937,429,000.00
4. 2. 1. 01.	Bagi Hasil Pajak	140,488,720,000.00
4. 2. 1. 01. 01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	130,000,000,000.00
4. 2. 1. 01. 02.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,500,000,000.00
4. 2. 1. 01. 03.	Bagi Hasil dari PPh Psd 21	4,790,890,000.00
4. 2. 1. 01. 04.	PPh pasal 25, 29	197,830,000.00
4. 2. 1. 01. 05.	Bagi hasil biaya pungut PBB	4,000,000,000.00
4. 2. 1. 02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	445,448,709,000.00
4. 2. 1. 02. 05.	Bagi Hasil dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	10,200,170,000.00
4. 2. 1. 02. 06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	248,439,000.00
4. 2. 1. 02. 08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	380,000,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4. 2. 1. 02. 09.	Bagi Hasil dan Pertambangan Gas Bumi	55.000.000.000.00
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	90.285.140.000.00
4. 2. 2. 01.	Dana Alokasi Umum	90.285.140.000.00
4. 2. 2. 01. 01.	Dana Alokasi Umum	90.285.140.000.00
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	38.974.000.000.00
4. 2. 3. 01.	Dana Alokasi Khusus	38.974.000.000.00
4. 2. 3. 01. 01.	Dana Alokasi Khusus	38.974.000.000.00
4. 3.	Lain - lain pendapatan yang sah	10.380.000.000.00
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	10.380.000.000.00
4. 3. 3. 01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	2.400.000.000.00
4. 3. 3. 01. 01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.350.000.000.00
4. 3. 3. 01. 03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.500.000.000.00
4. 3. 3. 01. 05.	Bagi Hasil dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	130.000.000.00
4. 3. 3. 01. 06.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	
	Jumlah	739.369.000.000.00
5.	BELANJA	402.074.889.566.00
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	213.179.518.066.00
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	100.132.021.066.00
5. 1. 1. 01.	Gaji dan Tunjangan	60.135.738.209.00
5. 1. 1. 01. 01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	7.404.822.000.00
5. 1. 1. 01. 02.	Tunjangan Keluarga	6.441.437.500.00
5. 1. 1. 01. 03.	Tunjangan Jabatan 1)	8.407.442.000.00
5. 1. 1. 01. 04.	Tunjangan Fungsional	5.351.190.000.00
5. 1. 1. 01. 05.	Tunjangan Umum	5.929.151.900.00
5. 1. 1. 01. 06.	Tunjangan Beras 1)	1.748.011.067.00
5. 1. 1. 01. 07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.383.890.00
5. 1. 1. 01. 08.	Pembulatan Gaji	1.000.000.000.00
5. 1. 1. 01. 09.	Iuran Asuransi Kesehatan	48.132.000.00
5. 1. 1. 01. 10.	Uang Paket 2)	30.876.300.00
5. 1. 1. 01. 11.	Tunjangan Panitia Musyawarah 2)	35.626.500.00
5. 1. 1. 01. 12.	Tunjangan Komisi 2)	16.625.700.00
5. 1. 1. 01. 13.	Tunjangan Panitia Anggaran 1)	7.125.300.00
5. 1. 1. 01. 14.	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	14.798.700.00
5. 1. 1. 01. 15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	3.048.000.000.00
5. 1. 1. 01. 16.	Tunjangan Perumahan 1)	220.000.000.00
5. 1. 1. 01. 17.	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	240.660.000.00
5. 1. 1. 01. 18.	Uang Jasa Pengabdian 1)	
5. 1. 1. 02.	Tambahan Penghasilan PNS	102.991.192.000.00
5. 1. 1. 02. 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	6.480.000.000.00
5. 1. 1. 02. 02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	71.922.192.000.00
5. 1. 1. 02. 03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	14.949.000.000.00
5. 1. 1. 02. 04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	9.640.000.000.00
5. 1. 1. 03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.502.480.000.00
5. 1. 1. 03. 01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000.00
5. 1. 1. 03. 02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	300.000.000.00
5. 1. 1. 03. 03.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000.00
5. 1. 1. 04.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	7.553.825.000.00
5. 1. 1. 04. 01.	Biaya Pemungutan PBB	7.000.000.000.00
5. 1. 1. 04. 02.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	553.825.000.00
5. 1. 3.	Belanja Subsidi	88.343.624.000.00
5. 1. 3. 01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	81.000.000.000.00
5. 1. 3. 01. 01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	75.000.000.000.00
5. 1. 3. 01. 02.	Belanja Subsidi kepada Lembaga Pendidikan	6.000.000.000.00
5. 1. 3. 03.	Belanja Subsidi kepada Masyarakat / Perorangan	7.343.624.000.00
5. 1. 3. 03. 01.	Belanja Subsidi kepada Rumah Tangga Miskin (RTM)	7.343.624.000.00
5. 1. 4.	Belanja Hibah	32.545.327.500.00
5. 1. 4. 01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.550.000.000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 1. 4. 01. 01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.550.000.000,00
5.1. 4. 05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	8.650.000.000,00
5. 1. 4. 05. 01.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	8.650.000.000,00
5.1. 4. 06.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	18.145.327.500,00
5. 1. 4. 06. 01.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	18.145.327.500,00
5.1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	31.148.000.000,00
5.1. 5. 01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	31.148.000.000,00
5. 1. 5. 01. 01.	Belanja Bantuan Sosial Keagamaan	14.400.000.000,00
5. 1. 5. 01. 02.	Bantuan Ormas Profesi	2.048.000.000,00
5. 1. 5. 01. 03.	Bantuan Organisasi Sosial	7.200.000.000,00
5. 1. 5. 01. 04.	Bantuan Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat	2.000.000.000,00
5. 1. 5. 01. 05.	Bantuan Sosial Organisasi Kepemudaan	4.000.000.000,00
5. 1. 5. 01. 06.	Bantuan Lembaga adat, Seni dan Budaya	1.500.000.000,00
5.1. 5. 04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	500.000.000,00
5. 1. 5. 04. 01.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	500.000.000,00
5.1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah De	34.558.420.000,00
5.1. 7. 03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	16.750.000.000,00
5. 1. 7. 03. 01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	16.750.000.000,00
5.1. 7. 04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lain	17.808.420.000,00
5. 1. 7. 04. 02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00
5. 1. 7. 04. 03.	Belanja Bantuan kepada Pemerintahan Desa	15.208.420.000,00
5. 1. 7. 04. 04.	Belanja Bantuan kepada Kelurahan	600.000.000,00
5.1. 8.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.1. 8. 01.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5. 1. 8. 01. 01.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5. 2.	Belanja Langsung	597.294.110.434,00
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	60.861.370.700,00
5.2. 1. 01.	Honorarium PNS	11.551.499.200,00
5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.469.387.200,00
5. 2. 1. 01. 02.	Honorarium Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa	687.786.500,00
5. 2. 1. 01. 03.	Honorarium Pejabat dan Staf Pelaksana Teknis Kegiatan	3.660.446.500,00
5. 2. 1. 01. 04.	Honorarium Petugas/ Pengawas Lapangan	824.674.000,00
5. 2. 1. 01. 05.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS	1.460.355.000,00
5. 2. 1. 01. 06.	Honorarium Panitia/Tim Penyelenggara Kegiatan	374.400.000,00
5. 2. 1. 01. 07.	Honorarium Peserta Kegiatan	2.074.450.000,00
5.2. 1. 02.	Honorarium Non PNS	47.292.251.500,00
5. 2. 1. 02. 01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS	2.015.630.000,00
5. 2. 1. 02. 02.	Honorarium Pegawai Honorrer/bidak tetap	30.830.555.000,00
5. 2. 1. 02. 03.	Honorarium Staf Administrasi Kegiatan	623.826.500,00
5. 2. 1. 02. 04.	Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan	13.555.740.000,00
5. 2. 1. 02. 05.	Honorarium Peserta Kegiatan	266.500.000,00
5.2. 1. 03.	Uang Lembur	1.135.415.000,00
5. 2. 1. 03. 01.	Uang Lembur PNS	408.400.000,00
5. 2. 1. 03. 02.	Uang Lembur Non PNS	727.015.000,00
5.2. 1. 05.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	882.205.000,00
5. 2. 1. 05. 01.	Belanja Kursus-kursus singkat / pelatihan	882.205.000,00
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	265.376.700.875,00
5.2. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.817.684.090,00
5. 2. 2. 01. 01.	Belanja alat tulis kantor	4.275.685.000,00
5. 2. 2. 01. 02.	Belanja Dokumentasi / Administrasi Tender	254.180.000,00
5. 2. 2. 01. 03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pjar,battery kenng)	632.539.000,00
5. 2. 2. 01. 04.	Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya	865.990.000,00
5. 2. 2. 01. 05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	650.650.000,00
5. 2. 2. 01. 06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.930.340.000,00
5. 2. 2. 01. 09.	Belanja Publikasi / Spanduk	206.550.000,00
5. 2. 2. 01. 10.	Belanja Dekorasi	1.750.000,00
5.2. 2. 02.	Belanja Bahan/Material	11.208.724.060,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 2. 02. 01.	Belanja bahan baku bangunan	158.260.000,00
5. 2. 2. 02. 02.	Belanja bahan/bibit tanaman	450.000.000,00
5. 2. 2. 02. 03.	Belanja bibit ternak	105.625.000,00
5. 2. 2. 02. 04.	Belanja bahan obat-obatan	6.040.624.000,00
5. 2. 2. 02. 05.	Belanja bahan kimia	1.701.800.000,00
5. 2. 2. 02. 07.	Belanja Alat Perengkapan	2.227.595.000,00
5. 2. 2. 02. 08.	Belanja Material/Hadiah	525.190.000,00
5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	70.353.895.600,00
5. 2. 2. 03. 01.	Belanja telepon	1.032.000.000,00
5. 2. 2. 03. 02.	Belanja air	431.880.000,00
5. 2. 2. 03. 03.	Belanja listrik	1.788.448.000,00
5. 2. 2. 03. 04.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang	106.520.000,00
5. 2. 2. 03. 05.	Belanja surat kabar/majalah	2.778.900.000,00
5. 2. 2. 03. 06.	Belanja kawat/faksimili/internet	699.200.000,00
5. 2. 2. 03. 07.	Belanja paket/pengiriman	81.200.000,00
5. 2. 2. 03. 08.	Belanja Sertifikasi	184.180.000,00
5. 2. 2. 03. 10.	Belanja jasa administrasi penerangan jalan umum	800.000.000,00
5. 2. 2. 03. 12.	Belanja sertifikat	58.890.000,00
5. 2. 2. 03. 15.	Belanja Koordinasi Perangkat Daerah	600.000.000,00
5. 2. 2. 03. 16.	Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan	530.000.000,00
5. 2. 2. 03. 17.	Belanja Jasa Akomodasi Tamu	450.000.000,00
5. 2. 2. 03. 18.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	550.000.000,00
5. 2. 2. 03. 19.	Belanja Operasional Umum	52.691.277.600,00
5. 2. 2. 03. 20.	Belanja Bantuan dan Subsidi	3.150.000.000,00
5. 2. 2. 03. 21.	Belanja Publikasi	193.800.000,00
5. 2. 2. 03. 22.	Belanja Jasa Notaris	27.600.000,00
5. 2. 2. 03. 23.	Belanja Jasa Humas	4.000.000.000,00
5. 2. 2. 04.	Belanja Premi Asuransi	3.829.800.000,00
5. 2. 2. 04. 01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	484.800.000,00
5. 2. 2. 04. 03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat	3.000.000.000,00
5. 2. 2. 04. 04.	Belanja Premi Asuransi Dana Bergulir dan Ekonomi Produktif	345.000.000,00
5. 2. 2. 05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.084.112.500,00
5. 2. 2. 05. 01.	Belanja Jasa Service	1.548.512.500,00
5. 2. 2. 05. 02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.166.000.000,00
5. 2. 2. 05. 03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.811.100.000,00
5. 2. 2. 05. 05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	145.000.000,00
5. 2. 2. 05. 07.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.413.500.000,00
5. 2. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.898.107.600,00
5. 2. 2. 06. 01.	Belanja cetak dan Penjilidan	4.041.544.200,00
5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan (Photo Copy)	2.678.325.300,00
5. 2. 2. 06. 03.	Belanja Dokumentasi	178.238.100,00
5. 2. 2. 07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.496.156.000,00
5. 2. 2. 07. 01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	500.000.000,00
5. 2. 2. 07. 02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	729.156.000,00
5. 2. 2. 07. 03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	267.000.000,00
5. 2. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	693.855.000,00
5. 2. 2. 08. 01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	470.655.000,00
5. 2. 2. 08. 02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	218.400.000,00
5. 2. 2. 08. 03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	4.800.000,00
5. 2. 2. 10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	132.550.000,00
5. 2. 2. 10. 01.	Belanja sewa meja kursi	18.400.000,00
5. 2. 2. 10. 03.	Belanja sewa proyektor	4.000.000,00
5. 2. 2. 10. 05.	Belanja sewa tenda	4.800.000,00
5. 2. 2. 10. 07.	Belanja Sewa Peralatan Sound System	65.350.000,00
5. 2. 2. 10. 08.	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	37.000.000,00
5. 2. 2. 10. 09.	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	3.000.000,00
5. 2. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.057.705.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 2. 11. 01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.243.410.000,00
5. 2. 2. 11. 02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.256.090.000,00
5. 2. 2. 11. 03.	Belanja makanan dan minuman tamu	840.700.000,00
5. 2. 2. 11. 04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.608.305.000,00
5. 2. 2. 11. 05.	Belanja makanan dan minuman pasien	775.000.000,00
5. 2. 2. 11. 06.	Belanja makanan dan minuman	3.334.200.000,00
5. 2. 2. 12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.892.780.000,00
5. 2. 2. 12. 04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.547.780.000,00
5. 2. 2. 12. 06.	Belanja Pakaian Seragam Sekolah	170.000.000,00
5. 2. 2. 12. 07.	Belanja Atribut	175.000.000,00
5. 2. 2. 13.	Belanja Pakaian Kerja	51.400.000,00
5. 2. 2. 13. 01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	51.400.000,00
5. 2. 2. 14.	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	1.344.450.000,00
5. 2. 2. 14. 04.	Belanja pakaian olahraga	1.269.000.000,00
5. 2. 2. 14. 05.	Belanja Pakaian Kegiatan	75.450.000,00
5. 2. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.116.134.900,00
5. 2. 2. 15. 01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.132.816.400,00
5. 2. 2. 15. 02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.362.658.500,00
5. 2. 2. 15. 04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.620.660.000,00
5. 2. 2. 16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.935.000.000,00
5. 2. 2. 16. 01.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	200.000.000,00
5. 2. 2. 16. 02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	775.000.000,00
5. 2. 2. 16. 03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.100.000.000,00
5. 2. 2. 16. 04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	60.000.000,00
5. 2. 2. 16. 05.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar Spesialis	300.000.000,00
5. 2. 2. 16. 06.	Belanja Pendidikan PNS Ijin Belajar	500.000.000,00
5. 2. 2. 17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.719.400.000,00
5. 2. 2. 17. 01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.327.900.000,00
5. 2. 2. 17. 03.	Belanja Kontribusi Diklat Teknis/Fungsional	812.500.000,00
5. 2. 2. 17. 04.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop dan lokakarya	100.000.000,00
5. 2. 2. 17. 05.	Belanja Penelitian dan Studi	479.000.000,00
5. 2. 2. 18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	300.000.000,00
5. 2. 2. 18. 01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	100.000.000,00
5. 2. 2. 18. 02.	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	200.000.000,00
5. 2. 2. 20.	Belanja Pemeliharaan	15.581.575.000,00
5. 2. 2. 20. 01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	1.603.800.000,00
5. 2. 2. 20. 02.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	550.000.000,00
5. 2. 2. 20. 03.	Belanja Pemeliharaan Instalasi	170.000.000,00
5. 2. 2. 20. 04.	Belanja Pemeliharaan Jaringan	89.275.000,00
5. 2. 2. 20. 06.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Besar	2.300.000.000,00
5. 2. 2. 20. 07.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan/Alat-alat Angkutan	4.023.000.000,00
5. 2. 2. 20. 08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel	10.000.000,00
5. 2. 2. 20. 09.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pertanian	15.000.000,00
5. 2. 2. 20. 10.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.742.500.000,00
5. 2. 2. 20. 11.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Alat Komunikasi	220.000.000,00
5. 2. 2. 20. 13.	Belanja Pemeliharaan Sistem Komputerisasi (Software)	1.738.000.000,00
5. 2. 2. 20. 14.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Transportasi Darat	100.000.000,00
5. 2. 2. 21.	Belanja Jasa Konsultansi	48.863.371.125,00
5. 2. 2. 21. 01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	700.000.000,00
5. 2. 2. 21. 03.	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi	8.994.906.825,00
5. 2. 2. 21. 04.	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi	7.755.064.300,00
5. 2. 2. 21. 05.	Belanja Jasa Konsultan IT	959.900.000,00
5. 2. 2. 21. 06.	Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi	30.451.500.000,00
5. 2. 3.	Belanja Modal	271.056.038.859,00
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	18.267.000.000,00
5. 2. 3. 01. 31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kab. Natuna	18.267.000.000,00
5. 2. 3. 03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	3.910.000.000,00

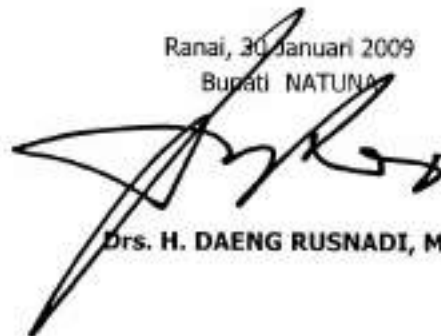
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 03. 02.	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor jeep	1.500.000.000.00
5. 2. 3. 03. 04.	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor bus	700.000.000.00
5. 2. 3. 03. 05.	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	210.000.000.00
5. 2. 3. 03. 06.	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor truck	350.000.000.00
5. 2. 3. 03. 10.	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	250.000.000.00
5. 2. 3. 03. 11.	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	900.000.000.00
5. 2. 3. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	500.000.000.00
5. 2. 3. 05. 01.	Belanja modal kapal motor	500.000.000.00
5. 2. 3. 08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	296.000.000.00
5. 2. 3. 08. 01.	Belanja modal mesin las	40.000.000.00
5. 2. 3. 08. 02.	Belanja modal mesin bubut	240.000.000.00
5. 2. 3. 08. 03.	Belanja modal mesin dongkrak	8.000.000.00
5. 2. 3. 08. 04.	Belanja modal mesin kompresor	8.000.000.00
5. 2. 3. 09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	144.000.000.00
5. 2. 3. 09. 01.	Belanja modal penggiling hasil pertanian	86.000.000.00
5. 2. 3. 09. 03.	Belanja modal mesin bajak	58.000.000.00
5. 2. 3. 10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	569.760.000.00
5. 2. 3. 10. 01.	Belanja modal mesin tik	22.200.000.00
5. 2. 3. 10. 02.	Belanja modal mesin hitung	9.060.000.00
5. 2. 3. 10. 04.	Belanja modal mesin fotocopy	70.000.000.00
5. 2. 3. 10. 08.	Belanja modal mesin penghancur kertas	103.000.000.00
5. 2. 3. 10. 12.	Belanja modal AC	214.000.000.00
5. 2. 3. 10. 13.	Belanja modal TV	95.000.000.00
5. 2. 3. 10. 14.	Belanja modal sound system	10.500.000.00
5. 2. 3. 10. 16.	Belanja Modal Papan Plang Kantor	4.000.000.00
5. 2. 3. 10. 17.	Belanja Modal Peralatan Keselamatan Kerja	42.000.000.00
5. 2. 3. 11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	682.510.000.00
5. 2. 3. 11. 01.	Belanja modal meja gambar	2.200.000.00
5. 2. 3. 11. 02.	Belanja modal almari	381.200.000.00
5. 2. 3. 11. 03.	Belanja modal brankas	123.950.000.00
5. 2. 3. 11. 04.	Belanja modal filling kabinet	154.560.000.00
5. 2. 3. 11. 05.	Belanja modal white board	20.600.000.00
5. 2. 3. 12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.247.234.000.00
5. 2. 3. 12. 01.	Belanja modal komputer mainframe/server	120.000.000.00
5. 2. 3. 12. 02.	Belanja modal komputer/PC	1.341.200.000.00
5. 2. 3. 12. 03.	Belanja modal komputer note book	877.800.000.00
5. 2. 3. 12. 04.	Belanja modal printer	434.300.000.00
5. 2. 3. 12. 05.	Belanja modal scanner	19.474.000.00
5. 2. 3. 12. 08.	Belanja modal UPS/stabilizer	167.100.000.00
5. 2. 3. 12. 09.	Belanja modal kelengkapan komputer (flash disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker)	33.000.000.00
5. 2. 3. 12. 10.	Belanja modal peralatan jaringan komputer	1.458.860.000.00
5. 2. 3. 12. 12.	Belanja Modal Pengadaan Software	795.500.000.00
5. 2. 3. 13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.519.922.000.00
5. 2. 3. 13. 01.	Belanja modal meja kerja	534.800.000.00
5. 2. 3. 13. 02.	Belanja modal meja rapat	20.000.000.00
5. 2. 3. 13. 03.	Belanja modal meja makan	14.000.000.00
5. 2. 3. 13. 04.	Belanja modal kursi kerja	568.358.000.00
5. 2. 3. 13. 05.	Belanja modal kursi rapat	53.000.000.00
5. 2. 3. 13. 07.	Belanja modal tempat tidur	90.240.000.00
5. 2. 3. 13. 08.	Belanja modal sofa	37.000.000.00
5. 2. 3. 13. 09.	Belanja modal rak buku/tv/kembang	153.000.000.00
5. 2. 3. 13. 10.	Belanja modal moubelair sekolah	43.524.000.00
5. 2. 3. 13. 11.	Belanja modal meja komputer	6.000.000.00
5. 2. 3. 14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	61.800.000.00
5. 2. 3. 14. 01.	Belanja modal tabung gas	2.500.000.00
5. 2. 3. 14. 02.	Belanja modal kompor gas	2.000.000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 14. 03.	Belanja modal lemari makan	17.500.000,00
5. 2. 3. 14. 04.	Belanja modal dispenser	8.000.000,00
5. 2. 3. 14. 05.	Belanja modal kulkas	4.300.000,00
5. 2. 3. 14. 06.	Belanja modal rak piring	7.500.000,00
5. 2. 3. 14. 07.	Belanja modal piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	20.000.000,00
5. 2. 3. 15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	29.500.000,00
5. 2. 3. 15. 01.	Belanja modal lampu hias	7.000.000,00
5. 2. 3. 15. 02.	Belanja modal jam dinding/meja	2.500.000,00
5. 2. 3. 15. 03.	Belanja Modal Gorden / Tirai	20.000.000,00
5. 2. 3. 16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	329.920.000,00
5. 2. 3. 16. 01.	Belanja modal kamera	147.520.000,00
5. 2. 3. 16. 02.	Belanja modal handycam	67.900.000,00
5. 2. 3. 16. 03.	Belanja modal proyektor	99.500.000,00
5. 2. 3. 16. 04.	Belanja Modal Alat Perekam (Tape Recorder)	15.000.000,00
5. 2. 3. 17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.392.850.000,00
5. 2. 3. 17. 01.	Belanja modal telepon	40.000.000,00
5. 2. 3. 17. 02.	Belanja modal faximili	10.000.000,00
5. 2. 3. 17. 03.	Belanja modal radio SSB	254.000.000,00
5. 2. 3. 17. 04.	Belanja modal radio HF/FM (Handy Talkie)	184.450.000,00
5. 2. 3. 17. 05.	Belanja modal radio VHF	242.000.000,00
5. 2. 3. 17. 06.	Belanja modal radio UHF	22.600.000,00
5. 2. 3. 17. 08.	Belanja Modal Peralatan Radio Komunikasi	1.639.800.000,00
5. 2. 3. 18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	45.200.000,00
5. 2. 3. 18. 04.	Belanja modal alat GPS	42.500.000,00
5. 2. 3. 18. 05.	Belanja modal kompas/peralatan navigasi	1.500.000,00
5. 2. 3. 18. 12.	Belanja modal current meter	1.200.000,00
5. 2. 3. 20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	70.000.000,00
5. 2. 3. 20. 07.	Belanja modal alat-alat laboratorium perikanan	70.000.000,00
5. 2. 3. 21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	63.700.497.950,00
5. 2. 3. 21. 01.	Belanja modal konstruksi jalan	1.562.000.000,00
5. 2. 3. 21. 04.	Belanja modal konstruksi jalan lapis hotmix	21.057.323.850,00
5. 2. 3. 21. 05.	Belanja modal konstruksi jalan lapis penetrasi macadam	4.943.072.000,00
5. 2. 3. 21. 06.	Belanja modal konstruksi jalan beton bertulang	13.794.329.000,00
5. 2. 3. 21. 07.	Belanja modal konstruksi jalan semen	1.630.000.000,00
5. 2. 3. 21. 08.	Belanja modal konstruksi jalan tanah	20.713.773.100,00
5. 2. 3. 22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	7.463.500.000,00
5. 2. 3. 22. 04.	Belanja modal konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	7.463.500.000,00
5. 2. 3. 23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.874.672.699,00
5. 2. 3. 23. 05.	Belanja modal konstruksi jaringan irigasi	150.000.000,00
5. 2. 3. 23. 06.	Belanja modal konstruksi jaringan air bersih/air minum	5.014.672.699,00
5. 2. 3. 23. 09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sistem Jaringan Drainase	2.710.000.000,00
5. 2. 3. 25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3.359.600.000,00
5. 2. 3. 25. 01.	Belanja modal instalasi listrik	1.555.000.000,00
5. 2. 3. 25. 04.	Belanja Modal Pembangkit Listrik	1.804.600.000,00
5. 2. 3. 26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	144.070.212.210,00
5. 2. 3. 26. 01.	Belanja modal konstruksi/pembelian gedung kantor	28.023.929.180,00
5. 2. 3. 26. 03.	Belanja modal konstruksi/pembelian rumah dinas	193.342.000,00
5. 2. 3. 26. 04.	Belanja modal konstruksi/pembelian gedung gudang	1.000.000.000,00
5. 2. 3. 26. 08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pelabuhan	700.000.000,00
5. 2. 3. 26. 09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Tempat Pendidikan	11.500.989.500,00
5. 2. 3. 26. 10.	Belanja Modal Rehabilitasi sedang/berat Bangunan	3.720.000.000,00
5. 2. 3. 26. 12.	Belanja Modal Konstruksi Fasilitas Keagamaan	87.602.365.530,00
5. 2. 3. 26. 13.	Belanja Modal Konstruksi Fasilitas Sosial	12.000.000,00
5. 2. 3. 26. 15.	Belanja Modal Pagur dan Batu Miring	10.496.384.000,00
5. 2. 3. 26. 17.	Belanja Modal Konstruksi Parkir Kendaraan Darat	821.202.000,00
5. 2. 3. 27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	104.000.000,00
5. 2. 3. 27. 08.	Belanja modal buku arkeologi	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 27. 11.	Belanja modal buku sejarah	2.000.000,00
5. 2. 3. 27. 13.	Belanja modal buku ilmu pengetahuan umum	100.000.000,00
5. 2. 3. 28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	125.000.000,00
5. 2. 3. 28. 07.	Belanja modal pengadaan souvenir dan plakat	125.000.000,00
5. 2. 3. 29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	1.020.000.000,00
5. 2. 3. 29. 03.	Belanja modal tanaman	1.020.000.000,00
5. 2. 3. 31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Lainnya	7.846.060.000,00
5. 2. 3. 31. 01.	Belanja Modal Perlengkapan Lainnya	7.846.060.000,00
5. 2. 3. 34.	Belanja Modal Pengadaan Marka/Rambu Transportasi	726.800.000,00
5. 2. 3. 34. 01.	Belanja Modal Marka/Rambu Transportasi Darat	726.800.000,00
5. 2. 3. 35.	Belanja Modal Bahan Bangunan	700.000.000,00
5. 2. 3. 35. 01.	Belanja Modal Bahan Bangunan Rumah	700.000.000,00
	Jumlah	999.369.000,00
	Surplus / (Defisit)	(260.000.000,00)
6.	PEMBIAYAAN	
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	260.000.000,00
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	260.000.000,00
6. 1. 1. 04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	260.000.000,00
6. 1. 1. 04. 01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	150.000.000,00
6. 1. 1. 04. 02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	110.000.000,00
	Jumlah	260.000.000,00
	Pembiayaan neto	260.000.000,00
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0

Ranai, 30 Januari 2009

Bupati NATUNA



Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si